BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dan penyampaian dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tiap tahunnya merupakan kewajiban dari pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintah kepada rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 1 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003) tentang Keuangan Negara. Berdasarkan (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021, 2020), Dokumen ini menghimpun gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal dalam rangka mengendalikan kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan.

Memasuki tahun 2021, pemerintah tetap menerapkan kebijakan fiskal ekspansif secara konsisten tidak lepas dari arahan kebijakan pendapatan negara yang merupakan salah satu komponen utama dalam struktur APBN selain belanja negara dan pembiayaan anggaran. Menurut Duja Badrud, (2016), Pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan memang menjadi harapan penerimaan negara terbesar, namun penerimaan perpajakan belum cukup mampu menutupi

seluruh pengeluaran negara yang ada. Oleh karena itu, pemerintah selalu mengencangkan optimalisasi PNBPN tiap tahunnya untuk mendukung penerimaan negara. Upaya kinerja PNBPN masih menemui tantangan yang signifikan di tahun 2021 akibat dari dampak COVID-19 yang masih dirasakan hingga kini. Salah satu potensi PNBPN yang belum optimal adalah PNBPN yang berasal dari pengelolaan aset negara terkait Barang Milik Negara (BMN). Secara garis besar, PNBPN pengelolaan BMN masuk ke kategori PNBPN lainnya yang jika dilihat memiliki potensi besar yang dapat diandalkan guna mengoptimalkan penerimaan negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Butir-butir siklus pengelolaan Barang Milik Negara ini tidak harus berjalan secara berkelanjutan, artinya dapat dilaksanakan independen sesuai kebutuhan instansi.

Bagian dari siklus pengelolaan Barang Milik Negara yang penting dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut adalah pelaksanaan pemindahtanganan BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016, Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN yang meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat. Oleh karena itu, penulis membatasi pembahasan pengelolaan BMN hanya pada tahap pelaksanaan pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan

mekanisme penjualan. Proses pelaksanaan pemindahtanganan BMN merupakan hal penting bagi instansi pemerintah salah satunya bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali. Secara garis besar, penjualan BMN di kanwil DJPb Provinsi Bali baru terlaksana di tahun 2021 hingga saat ini, sedangkan sebelum tahun 2021 belum pernah terjadi pemindahtanganan BMN dengan mekanisme apapun. Diketahui bahwa BMN yang sudah usang dan kemungkinan rusak berat terhitung cukup banyak dari tahun 2018, namun baru bisa terealisasi penjualannya di tahun 2021 karena memang proses pemindahtanganan BMN memerlukan prosedur dan proses yang panjang, ditambah lagi dalam praktiknya sering mengalami hambatan dan tantangan. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bahwa pemindahtanganan BMN wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna menunjukkan informasi keuangan yang andal dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik.

Berdasarkan penjelasan dan fakta tersebut, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan pelaksanaan pemindahtanganan BMN yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali. Penulis menuangkannya dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan dengan Mekanisme Penjualan di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang diajukan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana upaya Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali dalam mengoptimalkan pelaksanaan penjualan Barang Milik Negara yang baru terealisasi di tahun anggaran 2021?
- 2) Apakah pelaksanaan kegiatan pemindahtanganan dengan mekanisme penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku?
- 3) Apa saja hambatan yang muncul dalam penerapan kegiatan penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui upaya Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali dalam mengoptimalkan pelaksanaan penjualan Barang Milik Negara tahun anggaran 2021;
- 2) Meninjau kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemindahtanganan dengan mekanisme penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali dengan peraturan yang berlaku;
- 3) Mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penjualan Barang Milik Negara (BMN) selain tanah dan/atau bangunan di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini secara umum terkait dengan bagaimana pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara pada

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali. Cakupan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara sangat luas dengan beragam mekanisme, juga didasarkan pada fakta bahwa objek penelitian KTTA ini, yaitu DJPb Bali lebih sering mengadakan penjualan BMN dibandingkan mekanisme lainnya pada tahun 2021. Maka dari itu, penulisan KTTA ini hanya berfokus pada pembahasan mengenai pelaksanaan pemindahtanganan BMN dengan mekanisme penjualan yang selanjutnya dilakukan perbandingan antara implementasi dengan peraturan yang berlaku guna mengetahui apakah pelaksanaan secara nyata telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kriteria Barang Milik Negara yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah aset tetap yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali. Adapun pembatasan Barang Milik Negara yang akan dibahas yaitu berupa barang selain tanah dan/atau bangunan, seperti kendaraan dinas, peralatan, dan mesin. Mekanisme pengelolaan ini akan dibahas mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemindahtanganan berupa penjualan. Riset dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali yang terletak di Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Jl. Kusuma Atmaja, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur., Kota Denpasar, Bali.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Akademis

Hasil Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmu maupun praktik dalam pengembangan kajian Pengelolaan Keuangan Negara

khususnya terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam hal pelaksanaan pemindahtanganan BMN yang memenuhi sub unsur kegiatan pengendalian dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2) Manfaat praktis

1.1 Bagi peneliti selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir dapat digunakan sebagai dasar ataupun acuan penulisan dengan pembahasan yang sejenis oleh pihak *civitas academica*.

1.1 Bagi Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali

Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali tentang pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara agar kedepannya bisa lebih efektif dan efisien.

1.1 Bagi masyarakat

Penulis berharap masyarakat dalam membaca karya tulis ini, menjadi paham dan teredukasi mengenai kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali pada APBN melalui pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara tahun anggaran 2021.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

BAB I Pendahuluan berisi gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang akan disusun sekaligus menjelaskan secara garis besar mengenai apa yang menjadi topik pembahasan serta alasan yang melatarbelakangi pemilihan judul Karya Tulis Tugas Akhir. Dalam bab ini menguraikan subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II Landasan Teori berisi teori dan ketentuan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara khususnya mengenai pemindahtanganan Barang Milik Negara. Teori dan peraturan yang diuraikan meliputi definisi, dasar hukum, prosedur pelaksanaan pemindahtanganan BMN, sekaligus aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III Metode dan Pembahasan berisi subbab metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil guna melaksanakan tinjauan. Bab ini juga memberikan penjelasan mengenai rumusan masalah yang telah dihimpun pada BAB I beserta hasil pembahasan secara keseluruhan atas topik Karya Tulis Tugas Akhir ini. Landasan pembahasan pada BAB III didasarkan pada teori-teori yang telah dikumpulkan melalui metode kepustakaan dan dokumen-dokumen sumber yang relevan serta studi lapangan dan wawancara dengan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan BMN.

BAB IV SIMPULAN

BAB IV merupakan penutup yang berisi simpulan dari hasil tinjauan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Simpulan yang hendak dicapai adalah mengetahui proses pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan mekanisme penjualan di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali apakah sudah berjalan

dengan optimal dan sudah sesuai aturan. Pada bab ini juga berisi saran atau masukan yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan pemindahtanganan BMN.